

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kepercayaan Politik

Francis Fukuyama mendefinisikan kepercayaan adalah dimana setiap individu harus berperan sesuai kaidah dengan keteraturan, kejujuran, kerjasama dimana ini semua tercipta dari sebuah harapan yang timbul dari masyarakat. Carnevale dan Wechsler mendefinisikan kepercayaan sebagai tindakan yang sesuai dengan standar moral dan telah memberikan suatu anggapan bahwasannya terdapat suatu anggota atau grup yang mempunyai niat yang sah dan cakap (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009).

Dasgupta (1988) menegaskan bahwasannya pada suatu kepercayaan adalah tindakan seseorang agar percaya bahwa seseorang dan sekumpulan individu sampai batas tertentu terkait. Pada tahap pribadi seorang individu memercayai seseorang dalam hal melaksanakan suatu hal yang berpedoman pada suatu hal yang diketahui tentang mereka, kepribadian, kemampuan, reputasi. Bukan karena orang itu mengatakan mereka dapat melaksanakannya di jenjang yang kolektif, akan tetapi pada saat anda belum memberikan kepercayaan kepada seorang agensi atau organisasi yang berafiliasi dengan seseorang, Anda tidak akan memercayai mereka untuk membuat perjanjian ataupun kerjasama.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepercayaan

Menurut Job (2005) dan Putnam (dalam Tranter dan Skrbis, 2009) yaitu:

- a. Unsur rasionalitas berkarakter secara taktis dan diperhitungkan, atau dengan makna lainnya bahwasannya terdapat orang yang bisa diberikan suatu kepercayaan sebab memiliki bakat eksklusif ataupun menduduki jabatan khusus. Gagasan bahwa lahir kepercayaan umumnya disebabkan oleh faktor rasional (Coleman, Gambetta, Hardin, Luhmann, Yamagishi, dalam Job, 2005; Braun, 2011), dan hipotesis menciptakan kepercayaan di antara orang-orang. Jika tidak, perlu mengetahui informasi spesifik tentang siapa yang percaya.
- b. Faktor relasional juga dikenal sebagai faktor emosional atau faktor moral. Keandalan dalam kekerabatan bermula dari sikap seseorang yang berbudi pekerti yang baik. Kepercayaan relasional didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati oleh komunitas, dorongan bersama, dan minat. (Mishler dan Rose dalam Ayub, 2005). Teori hubungan, kepercayaan dibangun melalui pengalaman budaya dan pribadi, dan keyakinan bahwa individu dapat berfungsi di arena politik. Akibatnya, faktor rasional dan variabel relasional berperan dalam membangun kepercayaan.

3. Faktor-Faktor Yang Membentuk Kepercayaan

Kepercayaan seseorang terhadap orang lain dipengaruhi oleh tiga unsur, menurut Mayer (dalam Ainurrofiq, 2007). Ini adalah:

- a. Kepercayaan adalah area khusus, sehingga individu perlu menunjukkan keahlian mereka. Unsur pengalaman dan bukti keahlian seseorang akan menjadi dasar Apakah Anda percaya orang ini atau tidak, Anda memiliki pilihan. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) mendefinisikan care sebagai kombinasi antara kepedulian, empati, kepercayaan, dan penerimaan, yang semuanya merupakan komponen dari istilah tersebut. Faktor kompetensi, kejujuran, dan kebaikan telah disorot, dan dapat disimpulkan bahwa mereka adalah faktor yang membangun kepercayaan antara orang dan orang lain..
- b. Integritas dipertimbangkan dari pertanyaan apakah kata-kata setara dengan tindakan dan konsisten dengan kuantitas seseorang. Integritas tidak hanya tentang kejujuran, tetapi integritas membutuhkan kesabaran untuk memperoleh suatu tekanan yang datang. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) telah memberikan sebuah penjelasan bahwasannya pada *integrity* bisa dipandang dari sisi “Kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan

(*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*)”.

- c. Kebaikan berhubungan dengan niat (niat). Ada minat pada seseorang saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Ini akan membuatnya berpikir tentang orang ini dan memberinya keyakinan Sementara partai politik secara tradisional menjadi peserta yang paling aktif, periode demokrasi telah memunculkan banyak organisasi baru yang berharap dapat berdampak pada kebijakan publik. Sosialisasi dan politik erat kaitannya dengan konsep keterlibatan politik.

Bigley dan Pearce (1998) melakukan review literatur berdasarkan konteks yang berbeda untuk mempercayai hubungan, sedangkan review yang dilakukan oleh Mayer dkk (1995) melihat kepercayaan di tahun-tahun sejak ulasan diterbitkan. Ada 7 kontibutor kepercayaan publik yaitu: *Trustworthy* (dapat dipercaya), *Responsiveness* (responsif), *Integrity* (integritas) *sympathy and understanding* (simpati dan memahami) *Worthy of pride* (layak diapresiasi), *Effectiveness* (efektif), *Reliability* (keandalan).

Menurut Adam Lijebald, dkk (2008); “*Determinants of Trust for Public Lands: Fire and Fuels Management on the Bitterroot National Forest*”. Pada penelitian tersebut terdapat tiga aspek kepercayaan mencerminkan dimensi utama kepercayaan. Pertama, dihipotesiskan

bahwa kepercayaan dibangun di atas (*share norms and values*) landasan Norma dan Nilai Bersama, memberikan dasar bagi orang dan organisasi untuk saling percaya. Kedua, *willingness to endorse* (Kesediaan untuk Mendukung), bahwa mereka dapat mengetahui perilaku orang lain yang layak dipercaya, dan bahwa mereka memiliki keyakinan dalam hasil potensial atau berbagai hasil. Ketiga, berdasarkan apa yang diyakini pihak lain mampu (*Perceived Efficacy*), mereka akan memperluas tingkat kepercayaan yang sesuai. Ketiga dimensi ini, dengan atribut kontribusinya, dihipotesiskan untuk secara kolektif menentukan tingkat kepercayaan dalam hubungan atau situasi tertentu. Masing-masing dari tiga dimensi ini mengandung sejumlah elemen yang selanjutnya membantu menggambarannya.

4. Indikator Kepercayaan Publik

Untuk mengukur kepercayaan publik, tolak ukur yang bisa dipakai yakni antara lain:

Tabel 2.1

Indikator Kepercayaan Politik

Variabel X	Indikator
Kepercayaan Politik	<i>Trustworthy</i> (Dapat Dipercaya)
	<i>Responsiveness</i> (Responsif)
	<i>Integrity</i> (Integritas)
	<i>Sympathy and Understanding</i> (Simpati dan Memahami)
	<i>Worthy of pride</i> (Layak Diapresiasi)
	<i>Effectiveness</i> (Efektif)
	<i>Reliability</i> (Keandalan)

5. Partisipasi Politik

Kajian partisipasi politik pada awalnya terfokus pada partai politik sebagai aktor utama, namun dengan berkembangnya era demokrasi, banyak kelompok masyarakat yang ingin mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik. Konsep partisipasi politik juga terkait dengan interpretasi sosialisasi dan politik.

Partisipasi politik adalah proses di mana anggota masyarakat dapat berbagi pandangan atau pendapat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan, seperti pengambilan keputusan dan kegiatan yang disponsori pemimpin masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

"Bergabung" berasal dari akar bahasa Latin "*parses*" (bagian) dan "*capere*" (tiba). Kita dapat menggunakan "ambil" sebagai sinonim. bergabung, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim untuk tindakan bergabung. Dalam pengertian ini, keterlibatan politik dapat didefinisikan sebagai tindakan terlibat atau mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di tingkat politik dan kegiatan politik suatu negara. Menurut George dan Achilles (Rohaniah dan Efriza 2015: 467) partisipasi politik Dengan memberdayakan warga, bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Keterlibatan individu atau kelompok, direncanakan atau tidak direncanakan, semuanya dapat diterima. Memilih, mencalonkan diri,

atau bergabung dengan partai politik adalah contoh warga negara yang terlibat dalam politik.

Dalam pandangan Ramlan Subakti, partisipasi politik warga negara dapat dibedakan menjadi dua kategori: partisipasi aktif dan pasif. Berikut ini adalah daftar contohnya;

a. Partisipasi Aktif

Merupakan suatu aktivitas dari masyarakat dalam negeri dimana hal tersebut bertujuan dalam hal ikut pada sebuah penentuan kebijakan dalam pemilihan penyelenggara negara untuk kepentingan bersama.

b. Partisipasi Pasif

Ini ialah aktivitas sipil yang mendukung berfungsinya negara untuk menciptakan kesesuaian dengan tujuan. Jenis partisipasi meliputi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan penerapan kebijakan pemerintah.

Herbert McClosky (dalam Budiardjo. 2008: 367) mengemukakan Warga dapat mengambil bagian dalam proses pemilihan dan berbagai inisiatif kebijakan publik dengan cara ini, yang sepenuhnya terserah mereka. Menurut sumber yang sama (Arimbi, 1993: 17), partisipasi masyarakat merupakan proses komunikasi antara masyarakat yang merasakan pengaruh kebijakan dengan pemerintah yang membuat kebijakan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang yang luas dapat dijelaskan bahwasannya

pada partisipasi politik ini memiliki makna yakni dapat dijadikan suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kegiatan kepentingan sosial dan politik, seperti mampu memberikan pendapat dan menjadi bagian dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan.

Menurut Miriam Budiardjo (Cholisin 2007: 150), Partisipasi dalam politik dapat didefinisikan sebagai pemilihan pemimpin nasional dan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan publik oleh individu atau kelompok. Memilih dalam pemilihan umum, menghadiri rapat pemegang saham, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, dan menandatangani perjanjian dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen hanyalah beberapa opsi yang tersedia bagi Anda..

Adapun pengertian mengenai partisipasi politik berdasarkan pada pendapat para ahli yakni dibawah ini;

a. Keith Fauls

Keith Fauls (1999: 133) menyatakan bahwa partisipasi politik ialah masyarakat yang aktif dalam proses pemerintahan maupun individu ataupun sebuah kelompok. Keterlibatan ini termasuk penentangan terhadap pemerintah serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

b. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

Hunting dan Nelson (1997: 3) Partisipasi politik ialah aktifitas masyarakat secara individu yang berarti pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Keterlibatan seseorang dapat bersifat pribadi atau publik, direncanakan sebelumnya atau dadakan, tenang atau bergejolak, legal atau tidak sah, atau keduanya.

Partisipasi dalam politik dalam demokrasi demokrasi berakar pada keyakinan bahwa kedaulatan nasional adalah milik dan melayani rakyat. Dengan bekerja sama, itu menetapkan tujuan dan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa warga negara adalah warga negara yang baik. Akibatnya, keterlibatan politik menjadi sarana masyarakat untuk menjalankan otoritas politik hukumnya. Mereka yang berpartisipasi dalam proses politik (seperti pemungutan suara atau kegiatan lainnya) merasa bahwa kepentingan mereka akan dipandu atau setidaknya diinformasikan oleh kegiatan ini, dan bahwa mereka dapat mempengaruhi tindakan pembuat keputusan melalui tindakan ini. Membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Akibatnya, mereka percaya bahwa tindakan mereka memiliki dampak politik yang substansial.

Keterlibatan politik dan kesadaran politik adalah konsep yang saling terkait. Orang-orang menuntut suara dalam administrasi pemerintah karena mereka menjadi semakin sadar bahwa mereka

sedang diperintah. Mereka yang berpendidikan baik dan terhormat lebih mungkin memiliki wawasan ini. Partisipasi publik biasanya dianggap sebagai hal yang baik dalam masyarakat demokratis. Sementara keterlibatan minimal umumnya dipandang sebagai hal yang negatif, hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa banyak warga yang kurang tertarik pada isu-isu pemerintahan.

Menurut para ahli tersebut di atas, berpolitik adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Ini memiliki dampak yang signifikan pada siapa yang dipilih untuk melayani sebagai representasi rakyat dan bagaimana kebijakan pemerintah dirumuskan.

6. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Dua karakteristik utama yang mempengaruhi jumlah keterlibatan politik disebutkan oleh Ramlan Surbakti (1992:140). Yang pertama adalah kesadaran akan tempat seseorang di dunia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan inti dari kesadaran politik. Perlindungan politik, ekonomi, dan hukum hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis hak yang dimiliki orang. Tanggung jawab sipilnya sebagai anggota masyarakat dan anggota sistem politik juga memiliki dampak tingkat partisipasi politik. Faktor pertama sebenarnya tentang seberapa banyak pengalaman seseorang dengan masyarakat dan politik di sekitarnya.

Faktor kedua ialah tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasi pemerintah akan dinilai pada akhirnya dan diapresiasi. Penilaian ialah seperangkat keyakinan tentang apakah otoritas publik dapat dipercaya atau tidak dan terlepas dari apakah otoritas publik akan terpengaruh. Artinya, jika mereka melihat bahwa otoritas publik tidak dapat dipengaruhi dalam interaksi dinamis politik, dukungan dinamis mereka tidak akan ada habisnya.

Terlepas dari dua faktor di atas, ada faktor yang berbeda yang mempengaruhi kerjasama politik individu, seperti status sosial dan keuangan. Individu dengan situasi sosial tertentu, misalnya tempat atau posisi yang tinggi di mata publik, akan memiliki tingkat kepentingan politik yang lebih signifikan. Dengan cara yang sama, individu dengan status keuangan tinggi seringkali akan lebih dinamis dalam investasi politik. Variabel lain adalah asosiasi politik dan pengalaman hierarkis para wali.

Partisipasi politik wilayah lokal berfluktuasi dalam kekuatan dan struktur. Selain diidentikkan dengan kerangka politik, hal ini juga diidentikkan dengan perubahan sosial yang terjadi di arena publik. Seperti yang ditunjukkan oleh Weimer, ada lima hal yang bisa berdampak pada dukungan cakupan politik telah diperluas. Salah satunya adalah modernisasi, yang meliputi modernisasi dalam berbagai disiplin ilmu, komersialisasi hortikultura, industrialisasi, dan urbanisasi yang meluas, kecakapan yang diperluas, persekolahan yang

diperluas, dan peningkatan komunikasi yang luas/media yang lebih luas. Kemajuan ini termasuk asosiasi penduduk metropolitan baru, seperti buruh, pedagang dan ahli, dalam mempengaruhi pengaturan dan meminta mereka untuk mengambil bagian dalam menggunakan kekuatan politik sebagai pengingat bahwa individu memiliki kemampuan untuk membentuk nasibnya sendiri.

Pergeseran kelas sosial adalah faktor kedua yang perlu dipertimbangkan. Sebagai akibat dari industrialisasi dan modernisasi, telah terjadi peningkatan kelas menengah dan pekerja, yang menyebabkan pergeseran dalam keterlibatan politik. Partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh pengaruh intelektual dan kebangkitan media massa. Bangsa, liberalisme, dan egalitarianisme semuanya menganjurkan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Lebih mudah untuk mengirimkan ide kepada orang-orang dari semua lapisan masyarakat karena komunikasi yang luas. Keinginan masyarakat untuk didengar suaranya dalam membentuk kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh hal ini. Benturan ideologi politik adalah aspek terakhir yang harus dipertimbangkan.

Para ketua politik tersebut dimana saling berebut akan kekuasaan sering melakukannya dalam hal melakukan suatu pencarian bantuan mayoritas. Artinya, ujian kebebasan individu, sehingga perlawanan dan pertempuran kelas pekerja melawan hak istimewa yang memegang kekuasaan akan membangun suara

individu. Variabel kelima adalah kerjasama pemerintah yang jauh dan luas dalam masalah persahabatan, keuangan dan sosial. Perluasan tingkat latihan pemerintah ini secara teratur mendukung pengembangan latihan terkoordinasi untuk mengambil bagian dalam arah kemandirian politik.

Pemilih Dipengaruhi oleh faktor dalam (dari individu/individu) dan elemen luar (dari luar orang) ketika hanya memutuskan (memilih atau tidak). Blunt Lindenfeld (Maran, 2001:156) mengemukakan bahwasannya terdapat aspek yang paling penting dalam hal memberikan suatu dorongan pada individu untuk mengambil bagian dalam masalah pemerintahan adalah pemenuhan uang. Dalam ulasannya, Lindenfeld mengamati bahwa status moneter yang rendah membuat individu merasa ditolak Dunia politik. Milblas memiliki empat alasan utama mengapa dia ingin orang-orang terlibat dalam politik (Maran, 2001: 156) Pertama, individu perlu mengambil kepentingan dalam hidup karena dukungan. Yang kedua adalah akibat langsung dari kualitas individu itu sendiri. Ketiga, elemen sosial individu. Keempat, komponen keadaan politik atau iklim yang sebenarnya. Menurut Morris Rosenberg, mengapa seseorang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik;

- a. Pertama, disebabkan oleh kekhawatiran seseorang akan dampak buruk dari aktivitas politik..

- b. Kedua, bisa disebabkan oleh keyakinan bahwa partisipasi politik hanya buang waktu yang percuma.
- c. Ketiga, karena tidak adanya keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik

7. Bentuk Partisipasi Politik

Seperti yang ditunjukkan oleh Paige (dalam Cholisin, 2007: 153) Menyinggung perhatian politik dan kepercayaan pemerintah, kerangka politik dibagi menjadi empat jenis: kepentingan dinamis, dukungan terpisah dari yang dianiaya (apatis), kerjasama agresor revolusioner, dan investasi tidak aktif. Investasi dinamis ketika seorang individu memiliki Kesadaran politik dan kepercayaan pada pejabat publik menjadi prioritas utama. Dengan kata lain, selama masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah terhadap pejabat publik, maka investasi keuangannya dalam politik tidak akan tertekan (kurang perhatian). Dalam masyarakat di mana kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan publik pada otoritas rendah, kaum revolusioner lebih cenderung menyerang. Dengan asumsi bahwa kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pemerintah berlebihan, jenis dukungan ini dimungkinkan seharusnya bersifat laten.

Menurut Rush dan Althoff (Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 93), bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dalam aktivitas politiknya masing-masing:

- a. *Votting* (pemberian suara).
- b. Mengikuti dalam suatu pembicaraan politik dengan secara bebas untuk mengikuti kepentingan umum .
- c. Ikur serta dalam pelaksanaan musyawarah,
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*),
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu *politik (quasi political)*,
- f. Keanggotaan yang tidak berperan dalam suatu organisasi,
- g. Keanggotaan yang berperan dalam suatu organisasi,
- h. Mengejar jabatan politik atau administrasi.

Pemungutan suara adalah jenis partisipasi politik aktif yang paling populer di hampir setiap sistem politik yang demokratis dan otoriter, tetapi ada lebih banyak cara untuk terlibat dalam politik dalam skala yang lebih besar (Sitepu, 2012: 101). Politik bagi Gabriel Almond bersifat tradisional dan tidak ortodoks dalam pendekatannya.

- a. Bentuk Konvensional :
 - 1) *Votting*
 - 2) *Group discussion*
 - 3) *Campaign activities*
 - 4) Membangun dan masuk pada kelompok kepentingan.
 - 5) Berinteraksi dengan pejabat politik.

b. Bentuk Nonkonvensional :

- 1) Berdemonstrasi,
- 2) Konfontasi,
- 3) Aksi mogok
- 4) Melakukan persuhan seperti perusakan fasilitas umum
- 5) Tindakan criminal politik seperti penculikan dan pembunuhan
- 6) Aksi perang griliya dan arus perubahan

8. Indikator Partisipasi Politik

Dalam melakukan suatu partisipasi politik, maka indikator yang bisa dipakai yakni antara lain:

Tabel 2.2

Indikator Partisipasi Politik

Variable	Indikator
Partisipasi masyarakat	Mengikuti diskusi politik
	Mengikuti kampanye politik
	Menggunakan hak suara
	Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
	Dengan pengajuan petisi
	Komunikasi individual dengan pejabat politik/administrative
	Mendukung kebijakan pemerintah
	Mencari informasi politik

9. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara. 2013:152) kegiatan partisipasi dibedakan menjadi 4 (empat) ;

- a. Kelompok apatis :individu yang tidak sama sekali tertarik dalam berpolitik..
- b. Spektator :indivu yang hanya tertarik untuk menonton tidak ikut andil dalam kehidupan poltik.
- c. Gladiator : individu yang ikut serta dalam tindakan politik menjadi pembicara politik, mengadakan perkumpulan dalam pembahasan politik dan aktivis politik.
- d. Pengkritik : individu yang menjadi penyokong suatu gagasan dimana tidak setuju karna tidak sepehamaan.

Para ilmuwan telah merumuskan pelbagai tipologi partisipasi politik. Berikut pandangan ilmuwan dari mancanegara dan Indonesia, tentang tipologi partisipasi politik.

Gambar 2.1

Piramida Politik



Dalam buku "*The Comparative Study of Politics*," Jenis piramida partisipasi. Frekuensi dan identitas jenis partisipasi ini dapat dipisahkan. Ketika radikalisme politik seseorang meningkat, demikian juga jumlah orang yang dipengaruhinya. Pandangan piramida politik Ross dan Wilson mengungkapkan hal ini.

10. Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti, perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Artinya adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan, pelaksanaan, dan pelaksanaan keputusan politik. Perilaku politik dibedakan menjadi dua yaitu perilaku politik lembaga dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab mengambil, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik dan perilaku politik warga negara biasa yang tidak memiliki otoritas tetapi dapat mempengaruhi pengambil keputusan politik.

Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dapat digambarkan sebagai perilaku politik, menurut Sudijono Sastroatmojo (1995: 3). Kehidupan masyarakat dapat diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat melalui perilaku politik, legislasi, dan struktur kekuasaan yang memberdayakan otoritas.

Oleh karena itu, hanya aktivitas politik jenis ini yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi warga

negara/warga biasa tanpa otoritas. Perilaku politik mengacu pada tindakan pemilih selama pemilihan. Perilaku pemilih, menurut Mahendra (2005:75) mengacu pada partisipasi seseorang dalam pemilihan individu atau partai politik, atau beberapa hal lain yang menjadi perhatian publik. Menurut (Efriza 2012:480) yang mempelajari perilaku pemilih, kegiatan memilih individu sangat terkait dengan kegiatan tidak memilih dan mengambil keputusan pemilihan.

Seperti yang ditunjukkan Ramlan Surbakti (2010: 46), perilaku memilih dapat diamati dalam berbagai metode:

- a. Pendekatan Sosiologis, metode ini menunjukkan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh sifat-sifat sosial dan kelompok sosial.
- b. Psikologi adalah disiplin alami yang menyelidiki fungsi dan fenomena psikologi manusia dan mempengaruhi perilaku dan aktivitas sosial melalui kecerdasan pribadi. Ilmu politik erat kaitannya dengan psikologi, yang menganalisis perilaku publik (Sulhardi: 2008).
- c. Pendekatan rasional menjelaskan bahwa kegiatan pemilu dapat mempengaruhi tidak hanya tercapainya suatu hal yang diinginkan akan tetapi terdapat perbedaan antara alternatif, sebagai biaya pemungutan suara dan

perhitungan untung dan rugi, yang dianggap sebagai probabilitas pemungutan suara pilihan tersedia.

11. Pemilihan Umum

Menurut Ramlan Surbakti (1992: 181) pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme untuk memilih dan memberi kewenangan atau menyerahkan kedaulatan kepada orang atau partai yang dapat dipercaya. Pemilu juga dianggap sebagai salah satu cara paling ampuh bagi kedua bangsa untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Masyarakat luas sering Pemilu dipandang sebagai tipuan, dengan satu-satunya tujuan memilih pejabat pemerintah untuk bertindak sebagai pendukung kebijakan pemerintah yang sebenarnya. Memang, pemilihan adalah mekanisme yang disengaja untuk memasukkan konflik kepentingan ke dalam sistem politik.

Di Indonesia, pemilu sudah terlaksana sejak tahun 1955 dalam pemilihan pemilihan anggota DPR. Dalam sejarah Pemilu Pada tahun-tahun sebelum 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk memilih bupati dan wakil kepala daerah (DPRD). Namun sejak Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pemilihan harus dari keinginan rakyat bukan ajang kompetisi mendapatkan jabatan. Keinginan rakyat sebenarnya ditentukan oleh rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap pemilu dalam suatu pemilu selalu mengikutsertakan rakyat sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, partisipasi manusia sama sekali tidak mungkin. Pasalnya, ada beberapa kriteria yang sudah terpenuhi untuk bisa memilih di pemilu.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis memanfaatkan penelitian sebelumnya ini sebagai referensi saat melakukan penelitian sehingga ia dapat memperluas ide yang ia gunakan untuk meninjau penelitian saat ini. Sebagai acuan bagi penelitian penulis sendiri, penulis telah menyediakan beberapa penelitian. Sebelumnya penulis melakukan penelitian dalam bentuk penelitian.

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Ali Murdani (2010) dengan judul “*Kota Bogor, Daerah Tanah Sareal, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009*”,. Dalam hal ini pemilih untuk pertama kali, metode kuantitatif di gunakan dalam penelitian ini. Perbedaan penulis dengan Ali Murdani ialah bahwa untuk pertama kalinya Ali ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara*”. Penelitian tersebut oleh Ayuni Nur Fatwa mahasiswa Universitas Mulawarman pada tahun 2016. Dalam penelitian

ini membahas tentang kesadaran politik mempengaruhi partisipasi pemilih pada pemilihan bupati Desa Sesulu tahun 2013[J]. Penelitian ini membahas pengaruh kesadaran politik terhadap keterlibatan publik dengan cara yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pendidikan Politik terhadap peningkatan partisipasi pemilihan Gubernur Thun 2018 di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari*” yang diteliti oleh Tyas Fatharani Mahasiwan Universitas Siliwangi pada tahun 2019. Persamaan dari penelitian ini sama-sama kuantitatif dan membahas pengaruh partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Tabel 2.3

Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ali Mardani	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif 2009 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.	Metode Penelitian Kuantitatif	Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor media, faktor nilai budaya remaja, faktor intelektual dan faktor pendidikan politik
2	Ayuni Nur Fatwa	Pengaruh Kesadaran Politik	Metode Penelitian	Hasil bahwa kesadaran politik

		Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara.	Kuantitatif	masyarakat berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dimana tingginya kesadaran politik semakin tinggi partisipasi politiknya.
3	Tyas Fatharani	Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 Di Kelurahan Setiawari Kecamatan Tamansari.	Metode penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur 2018 di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari

C. Kerangka Pemikiran

Menurut landasan teori penelitian ini dan definisi yang ada, kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa variabel dalam penelitian ini

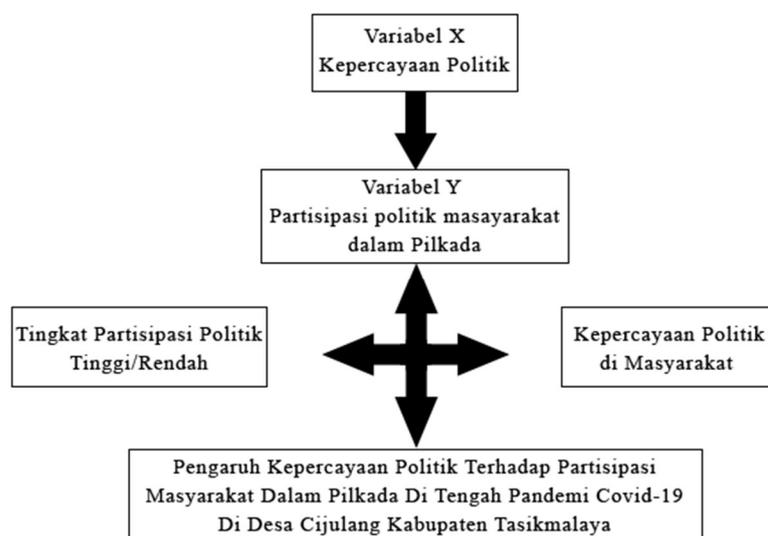
ialah variabel Independent yaitu kepercayaan politik dan variabel dependent yaitu partisipasi masyarakat. Dimana pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal tersebut tidak mungkin terlepas dari faktor internal maupun faktor eksternal itu sendiri.

Ikut serta dalam proses demokrasi sangat penting. Partisipasi politik di Indonesia dipandang sebagai salah satu bentuk demokrasi di negara ini. Masyarakat Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasimalaya, saat ini memiliki 3.728 hak pilih untuk berpolitik, khususnya pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2020, akan ada pemilihan presiden sangat berbeda karena PILKADA dilaksanakan di tengah pandemi. Akan tetapi pada masyarakat di Desa Cijulang pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu memiliki partisipasi yang cukup bagus karena adanya peningkatan partisipasi hak suara yang digunakan yaitu 76,87%.

Tercatat jumlah hak pilih masyarakat Desa Cijulang yaitu 3.278 dan hak suara yang digunakan 2.520 dengan hal itu Hak suara yang tidak digunakan hanya 758. Dibandingkan PILKADA tahun 2015 partisipasi masyarakat Desa Cijulang hanya 67,57%. Masyarakat Desa Cijulang Membatah argumen banyak pihak yang menilai bahwa PILKADA di tengah pandemi ini akan mengalami penurunan partisipasi Masyarakat. Keterlibatan seseorang dalam Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Partisipasi politik dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal, sehingga memungkinkan warga negara Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis yang telah di tentukan sebelumnya yaitu kepercayaan politik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Cijulang Dalam PILKADA di tengah pandemi *Covid-19*.

Hipotesis :

Ho: Tidak terdapat pengaruh positif antara pengaruh Kepercayaan Politik terhadap partisipasi masyarakat dalam PILKADA di Desa Cijulang.

Ha: Terdapat pengaruh positif antara kepercayaan politik terhadap partisipasi masyarakat di Desa Cijulang.